

# Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrual Di Pemerintah Kota Lhokseumawe

*This study aims to determine the effect of human resources, organizational commitment, information and communication technology on the application of accrual-based accounting standards at the Lhokseumawe City Government. This research uses quantitative methods. The total population of 33 SKPDs in the Lhokseumawe City Government. The sample of this study consisted of 2 respondents from each SKPD, namely the head of finance and employees who operate the SIMDA application as many as 66 respondents. The data was collected by distributing questionnaires with a liker scale measurement. Data analysis in this study using multiple linear analysis. The results of this study indicate that human resources have no effect on the application of accrual-based accounting standards at the Lhokseumawe City Government. Organizational commitment and information technology have an effect on the application of accrual-based accounting standards in the Lhokseumawe City Government. Communication has no effect on the application of accounting standards in the Lhokseumawe City Government.*

**Keywords:** *Human Resources, Organizational Commitment, Information Technology, Communication, Application of Accrual Basis Accounting Standards*

**Nur Afni Yunita<sup>1</sup>,  
Muhammad Yusra<sup>2</sup>  
Arliansyah<sup>3</sup>, Nurhasanah<sup>4</sup>  
Kasman<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikusaleh

Corresponding Author  
[nurafni.yunita@unimal.ac.id](mailto:nurafni.yunita@unimal.ac.id)

## PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan baik secara organisasi, lembaga maupun manajerial di sektor publik, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perubahan pengelolaan keuangan dapat dicontohkan seperti perubahan dari kas basis menuju ke akrual basis. Perubahan sistem pengelolaan keuangan tersebut menyebabkan sistem manajemen sektor publik menjadi lebih mengakomodasi pasar dan fleksibel, yang kita kenal dengan istilah *New Public Management* (NPM) (Ismet, 2015).

Pengadopsi NPM di Indonesia diawali dengan ditetapkannya UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004 dan UU No. 15 tahun 2004 tentang ketentuan dalam salah satu undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah mewajibkan adanya standar akuntansi pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan pemerintah (Ismet, 2015). Undang-undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 (Ismet, 2015). Penetapan PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Safitri, 2017).

Penerapan SAP membawa perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang sebelumnya menggunakan standar akuntansi berbasis kas berubah menjadi standar akuntansi berbasis akrual. SAP berbasis kas mengakui pencatatan transaksi dan pengakuan terjadi hanya saat kas keluar dan kas masuk dan sama sekali tidak mencatat kewajiban serta aset. Sementara basis akrual mencatat dan mengakui semua transaksi pada saat itu juga terjadi dan mencatat semua aset dan kewajiban (Ismet, 2015). Maka dari itu dengan menggunakan pencatatan SAP berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi basis kas memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan basis kas adalah mudah dimengerti dan dijelaskan, mudah mencari petugas akuntansi karena tidak perlu keahlian yang tinggi dalam konsep akuntansi, dan laporannya mampu memperlihatkan sumber-sumber keuangan. Adapun kekurangan dari Basis kas yaitu mengabaikan arus sumber daya selain kas yang mungkin mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan

barang/jasa saat sekarang dan saat mendatang. Basis kas juga tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya (cost of goods/services) sebagai alat untuk penetapan harga, kebijakan kontrak publik, serta evaluasikinerja (Suharso, 2016).

Basis akrual juga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain mampu memperlihatkan akuntabilitas penggunaan seluruh sumber daya serta pengelolaan aset dan kewajiban, mampu memperlihatkan pendanaan dan pemenuhan kebutuhan kas seluruh aktivitas organisasi, memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan organisasi dalam mendanai aktivitas serta memenuhi kewajiban dan komitmennya dan memungkinkan evaluasi kinerja organisasi terkait biaya dan efisiensi kegiatan. Kekurangannya terletak pada kompleksitas sistem dan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih ahli di bidang akuntansi (Suharso, 2016).

Akuntansi basis akrual (*accrual basis*) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan (Riyanto, 2015).

Halim (2007), juga menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas yang di terima atau dibayar).

Menurut Andriyani (2017) dalam Erawati dan Kurniawan (2018) sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka seluruh organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi.

Fungsi sumber daya manusia yaitu sebagai penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dalam organisasi tersebut. Indikator sumber daya manusia dapat di lihat dari integritas/ optimasi, kompetensi, loyalitas, *reward*, motivasi dan budaya organisasi (Inznillah, 2015 dalam Erawati dan Kurniawan, 2018). Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka akan lebih memudahkan penerapan SAP basis akrual, karena apabila tidak ada SDM penerapan SAP basis akrual tidak akan bisa diterapkan dengan baik.

Komitmen organisasi ialah suatu keadaan seseorang karyawan yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan. Robbins (2008) dalam Erawati dan Kurniawan (2018) berpendapat bahwa

komitmen organisasi merupakan suatu keadaan individu yang mempunyai sifat organisasi dan tujuan ingin untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Zeyn (2011) dalam Erawati dan Kurniawan (2018) mendefinisikan bahwa komitmen organisasi merupakan sebagai suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi.

Menurut Permatasari (2018) bahwa pemerintahan daerah yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk diberikan kepada setiap anggota organisasi supaya bisa lebih meningkatkan keberhasilan yang ingin dicapai. Semakin baik komitmen organisasi pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dalam kesuksesan penerapan SAP basis akrua.

Indikator komitmen organisasi dapat diukur dengan memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas, kesiapan kedisiplinan serta tanggung jawab dalam penerapan SAP, memiliki kesiapan pelaksanaan tugas pelayanan publik dan administrasi publik dengan memanfaatkan SAP, memiliki tanggung jawab moral, komitmen, integritas dan transparansi pembangunan SAP dalam mendukung optimasi tugas pemerintah daerah.

Menurut Rahman (2015) dalam Erawati dan Kurniawan (2018) teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Fungsi dari teknologi informasi yaitu untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pada pemerintah daerah yang berbasis akrua akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi (Inznillah, 2015 dalam Erawati dan Kurniawan, 2018).

Menurut Effendy (2009) dalam Susanti (2015) komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Susanti (2015) juga

menjelaskan bahwa komunikasi merupakan alat utama yang digunakan dalam rangka melakukan interaksi yang berkesinambungan untuk pencapaian tujuan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari penerapan kebijakan publik. Putra (2015) dalam Ismet (2018) menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan secara berkesinambungan untuk mengatur dan melaksanakan stantar yang baru. Maka dari itu, harus disusun beberapa kebijakan dan sosialisasi agar penerapan SAP yang baru bisa berjalan dengan baik.

Penerapan yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui oleh para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Indikator dari komunikasi dapat dilihat dari kebijakan dan prosedur yang disosialisasikan, intruksi yang jelas, evaluasi kinerja, adanya sarana dan prasarana komunikasi untuk pihak internal, adanya sarana dan prasarana komunikasi untuk pihak eksternal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

### Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Basis akuntansi akrua seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP dalam Faradillah (2013) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

### Sumber Daya Manusia

Menurut Andriyani (2017) dalam Erawati dan Kurniawan (2018) sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka seluruh organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi.

### Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi ialah suatu keadaan seseorang karyawan yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan. Robbins (2008) dalam

Erawati dan Kurniawan (2018) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan individu yang mempunyai sifat organisasi dan tujuan ingin untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

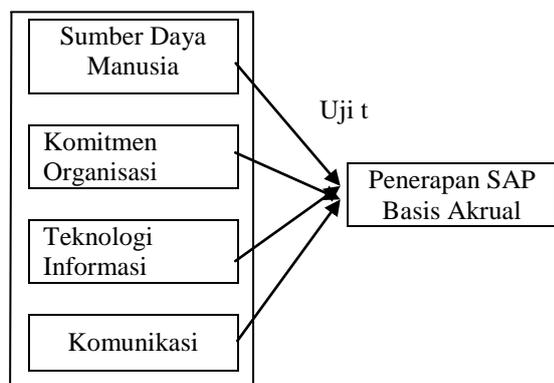
### Teknologi Informasi

Teknologi informasi menurut William dan Sawyer dalam Haryanto (2012), yaitu istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi.

### Komunikasi

Menurut Effendy (2009) dalam Susanti (2015) komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

### Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub>: Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP basis akrual.
- H<sub>2</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP basis akrual.
- H<sub>3</sub>: Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP basis akrual.
- H<sub>4</sub>: Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP basis akrual.
- H<sub>5</sub>: Sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP basis.

### Lokasi dan Objek Penelitian

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan sasaran untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Kota Lhokseumawe pada tahun 2021. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah pemerintahan daerah Kota Lhokseumawe.

### Populasi

Menurut Sugiyono (2013:117) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan Kota Lhokseumawe yang berjumlah 33 SKPD.

### Sampel

Menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh (Sugiyono, 2002) mengatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus". Maka dari itu, penulis memilih sampel menggunakan teknik sampel jenuh karena seluruh SKPD yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan Kota Lhokseumawe yang menjadi populasi dalam penelitian ini menerapkan SAP berbasis akrual dan menggunakan aplikasi SIMDA sebagai teknologi informasi yang digunakan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dari masing-masing SKPD dan satu karyawan bagian keuangan yang menjalankan aplikasi SIMDA. Sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 66 responden

### Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data primer, maka untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden berupa kuisisioner.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas terlihat bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) butir pertanyaan, semua mempunyai  $r_{hitung}$  di atas  $r_{tabel}$  (0,242). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner pada 4 variabel independen dan variabel dependen dinyatakan valid. Butir pertanyaan dikatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan nilai signifikan setiap pertanyaan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan angket sah dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian.

### Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terlihat bahwa hasil *croanbach alpha* dari variabel sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) yaitu sebesar  $0,756 > 0,60$ , variabel komitmen organisasi ( $X_2$ ) sebesar  $0,760 > 0,60$ , variabel teknologi informasi ( $X_3$ ) sebesar  $0,767 >$

0,60, variabel komunikasi ( $X_4$ ) sebesar 0,776, dan variabel penerapan standar akuntansi basis akrual ( $Y$ ) sebesar 0,722 > 0,60. Dengan demikian semua butir-butir variabel pertanyaan diatas memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada penelitian ini sudah memenuhi syarat kehandalan (*reliabel*).

### Hasil Uji Normalitas

Dari uji normalitas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini adalah 0,094 dengan tingkat *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Dari hasil uji multikolinieritas maka dapat diketahui nilai toleransi dan nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- Nilai toleransi untuk variabel sumber daya manusia ( $X_1$ ) sebesar 0,424 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,359 < 10. Sehingga variabel sumber daya manusia dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- Nilai toleransi variabel komitmen organisasi ( $X_2$ ) sebesar 0,505 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,979 < 10. Sehingga variabel komitmen organisasi dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- Nilai toleransi variabel teknologi informasi ( $X_3$ ) sebesar 0,466 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,146 < 10. Sehingga variabel teknologi informasi dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- Nilai toleransi variabel komunikasi ( $X_4$ ) sebesar 0,541 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,847 < 10. Sehingga variabel komunikasi dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji heteroskedastisitas maka dapat diketahui nilai probabilitas signifikan pada masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- Nilai probabilitas signifikan untuk variabel sumber daya manusia ( $X_1$ ) sebesar 0,238 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia ( $X_1$ ) tidak terdapat heteroskedastisitas.
- Nilai probabilitas signifikan untuk variabel komitmen organisasi ( $X_2$ ) sebesar 0,532 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi ( $X_2$ ) tidak terdapat heteroskedastisitas.
- Nilai probabilitas signifikan untuk variabel teknologi informasi ( $X_3$ ) sebesar 0,324 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi informasi ( $X_3$ ) tidak terdapat heteroskedastisitas.
- Nilai probabilitas signifikan untuk variabel komunikasi ( $X_4$ ) sebesar 0,122 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi ( $X_4$ ) tidak terdapat heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis linear berganda dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,106 - 0,079X_1 + 0,262X_2 + 0,466X_3 + 0,106X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 1,106. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$  memiliki nilai konsisten sebesar 1,106, apabila sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai 0,000.
- Nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia  $X_1$  sebesar 0,079 menunjukkan hubungan negatif, memberikan arti bahwa setiap penurunan sumber daya manusia  $X_1$  sebesar 1 poin skala *likert* maka menyebabkan penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$  menurun sebesar 0,079 kearah negatif dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi  $X_2$  sebesar 0,262 menunjukkan hubungan positif, memberikan arti bahwa setiap kenaikan komitmen organisasi  $X_2$  sebesar 1 poin skala *likert* maka menyebabkan penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$  meningkat sebesar 0,262 kearah positif dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel teknologi informasi  $X_3$  sebesar 0,466 menunjukkan hubungan positif, memberikan arti bahwa setiap kenaikan teknologi informasi  $X_3$  sebesar 1 poin skala *likert* maka menyebabkan penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$  meningkat sebesar 0,466 kearah positif dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel komunikasi  $X_4$  sebesar 0,106 menunjukkan hubungan positif, memberikan arti bahwa setiap kenaikan komunikasi  $X_4$  sebesar 1 poin skala *likert* maka menyebabkan penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$  meningkat sebesar 0,106 kearah positif dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

- Pengaruh variabel sumber daya manusia  $X_1$  terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$ . Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,401 > 0,05$  maka hipotesis  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti variabel sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.
- Pengaruh variabel komitmen organisasi  $X_2$  terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$ .

Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,016 < 0,05$  maka hipotesis  $H_2$  diterima. Hal ini berarti variabel komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

3. Pengaruh variabel teknologi informasi  $X_3$  terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$ .

Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,001 < 0,05$  maka hipotesis  $H_3$  diterima. Hal ini berarti variabel teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

4. Pengaruh variabel komunikasi  $X_4$  terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$ .

Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,149 > 0,05$  maka hipotesis  $H_4$  ditolak. Hal ini berarti variabel komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji simultan dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi  $F$  sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil uji determinasi ( $R^2$ ) di peroleh angka Adjusted R square ( $R^2$ ) sebesar 0,400 atau (40,0%) hal ini menunjukkan besarnya variabel independen sumber daya manusia ( $X_1$ ), komitmen organisasi ( $X_2$ ), teknologi informasi ( $X_3$ ) dan komunikasi ( $X_4$ ) dalam menjelaskan variabel dependen (penerapan standar akuntansi basis akrual  $Y$ ) sebesar 40,0% sedangkan sisanya 60,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### Pengaruh Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrua ( $Y$ )

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,401 > 0,05$ . Dari hasil analisis statistik tersebut dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena dalam penerapan standar akuntansi basis akrual di pemerintahan kota lhokseumawe sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang dan belum memadai di bidang akuntansi, sedangkan penerapannya sudah harus di terapkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dan muntlak harus dijalankan sesuai PP No. 71 tahun 2010. Dengan demikian walaupun suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten atau tidak kompeten penerapan standar akuntansi basis akrual tersebut harus tetap di jalankan, sehingga menyebabkan sumber daya manusia di pemerintahan Kota

Lhokseumawe tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

Widyastuti dan Adiputra (2015) dalam Erawati dan Kurniawan (2018) menyatakan bahwa kesiapan pemerintah daerah dilihat dari kualitas sumber daya manusia, disini dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam menggunakan sistem informasi manajemen daerah masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan cara pengaplikasiannya.

Menurut Warisno dalam Putri (2010) Sumber Daya Manusia berfungsi sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erawati dan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ismet (2018) juga menyatakan bahwa sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Namun demikian hal ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Silviana (2017), Safitri (2017), Putra dan Arianto (2015) dan Agusti (2015) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### Pengaruh Komitmen Organisasi ( $X_2$ ) Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrua ( $Y$ )

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,016 < 0,05$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Hal ini membuktikan bahwa pegawai dan atasan yang ada di SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki komitmen organisasi yang kompeten dalam mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi basis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Berdasarkan PP tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mulai tahun 2015 berkewajiban melaksanakan standar akuntansi basis akrual, sehingga sudah menjadi tujuan SKPD Kota Lhokseumawe untuk ikut menerapkannya. Semakin tinggi komitmen organisasi SKPD dan staf keuangan maka akan semakin baik dan berhasil dalam penerapan standar akuntansi basis akrual.

Menurut Sulani (2009) dalam Putri dan silviana (2017) pegawai pemerintah yang berkomitmen akan bekerja secara maksimal karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi tempat dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintah yang memiliki komitmen tinggi karena berfikir bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal akan memiliki pemahaman atau

penghayatan terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Azhar (2007) dalam Ismet (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan bagian yang terkait dengan kinerja karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaannya, dalam arti keinginan untuk melaksanakan tugas dalam hal pengelolaan keuangan daerah walaupun peraturan keuangan daerah sering berubah.

Pemerintahan daerah yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk diberikan kepada setiap anggota organisasi supaya bisa lebih meningkatkan keberhasilan yang ingin dicapai. Semakin baik komitmen organisasi pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dalam kesuksesan penerapan SAP basis akrual (Permatasari, 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Silviana (2017), Erawati dan Kurniawan (2018), Safitri (2017), Putra dan Arianto (2015) dan Susanti Agusti (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Namun demikian hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ismet (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### **Pengaruh Teknologi Informasi (X<sub>3</sub>) Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrua (Y)**

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,027 < 0,05$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan standar akuntansi basis akrual SKPD Kota Lhokseumawe telah mempersiapkan teknologi informasi yang memadai untuk keberhasilan penerapan standar akuntansi basis akrual. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah menyadari bahwa segala sistem dan pencatatan keuangan telah dilakukan secara online atau terkomputerisasi. Dengan adanya teknologi informasi yang memadai ini akan membantu kinerja pegawai dalam mencapai hasil yang maksimal. Pegawai juga dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat yang ada tersebut dengan baik, serta perangkat keras yang digunakan telah didukung dengan perangkat lunak terbaru yang semakin memudahkan pegawai dalam pekerjaannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada SKPD Kota Lhokseumawe aplikasi yang digunakan dalam pencatatan keuangan adalah aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sehingga teknologi informasi sangat berpengaruh dalam upaya penerapan standar akuntansi basis akrual.

Menurut Candra (2013) dalam Susanti dan Agusti (2015) dukungan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAP. Erawati dan Kurniawan (2018) juga menyatakan

bahwa penerapan standar akuntansi pada pemerintah daerah yang berbasis akrual akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisis dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintah pada sektor publik yang berbasis akrual.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismet (2018) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Namun demikian hal ini tidak sejalan dengan penelitian Erawati dan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual, Susanti dan Agusti (2015) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### **Pengaruh Komunikasi (X<sub>4</sub>) Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrua (Y)**

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikansi  $t = 0,149 > 0,05$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Hal ini diduga karena kurangnya komunikasi antara karyawan dengan atasan yang ada di SKPD Kota Lhokseumawe. Ini juga diperkuat dengan hasil jawaban kuesioner yang di sebar peneliti pada setiap SKPD Kota Lhokseumawe yang sebagian besar responden merasa tidak puas dengan komunikasi yang ada, dibuktikan dengan sebagian hasil jawaban responden yang condong mengarah ke kiri (Negatif), sebagian responden menjawab tidak setuju di bandingkan dengan jawaban responden yang menuju ke kanan (Positif) atau setuju.

Penerapan standar akuntansi basis akrual merupakan kewajiban dan amanat undang-undang untuk setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga standar akuntansi basis akrual telah dikomunikasikan sejak dikeluarkannya PP No.71 tahun 2010 dan proses transisi penggunaan standar akuntansi basis akrual telah dilakukan sampai tahun anggaran 2014 (Susanti dan Agusti, 2015). Dengan demikian baik atau buruknya komunikasi yang di terapkan atau di jalankan di SKPD Kota Lhokseumawe, penerapan standar akuntansi basis akrual harus tetap di jalankan sesuai PP No. 71 tahun 2010, hal ini menyebabkan komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di SKPD Kota Lhokseumawe.

Susanti dan Agusti (2015) juga menjelaskan bahwa komunikasi adalah alat utama yang digunakan dalam rangka melakukan interaksi yang berkesinambungan untuk pencapaian tujuan.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari penerapan kebijakan publik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti dan Agusti (2015) yang menyatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Namun demikian hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ismet (2018), Putri dan Silviana (2017), Safitri (2017), dan Putra dan Ariyanto (2015) yang menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Komitmen Organisasi ( $X_2$ ), Teknologi Informasi ( $X_3$ ) dan Komunikasi ( $X_4$ ) terhadap Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrua (Y)**

Berdasarkan analisis statistik dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi F sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual. Dengan demikian, dalam upaya penerapan standar akuntansi basis akrual, SKPD Kota Lhokseumawe harus memperhatikan keempat hal berikut ini yaitu sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai penerapan standar akuntansi basis akrual yang memadai.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismet (2018) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh bersamaan terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di SKPD Kota Lhokseumawe.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Komunikasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di pemerintah Kota Lhokseumawe.
5. Sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual di pemerintah Kota Lhokseumawe.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner pada penelitian ini masih berupa pertanyaan terbatas, sehingga responden tidak dapat menyalurkan pendapat secara bebas sesuai dengan pemikiran responden.
2. Responden pada penelitian ini terbatas hanya menggunakan kepala bagian keuangan dan penjalan aplikasi simda pada SKPD Kota Lhokseumawe saja, sehingga dimungkinkan untuk menambah jumlah responden.
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi sehingga dimungkinkan untuk menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi basis akrual.

### **Saran**

1. Kepada pemerintah daerah Kota Lhokseumawe agar lebih bisa meningkatkan sumber daya manusia, komitmen dalam sebuah organisasi, teknologi informasi yang memadai dalam rangka memudahkan proses kerja, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah merealisasikan kepada karyawan sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.
2. Kepada sumber daya manusia yang ada di pemerintahan kota Lhokseumawe agar lebih bisa meningkatkan kemampuan dan memahami tentang standar akuntansi pemerintah basis akrual, sehingga kedepannya bisa mendukung sepenuhnya penerapan standar akuntansi basis akrual yang telah di tetapkan sesuai PP No. 71 tahun 2010.
3. Komitmen organisasi di pemerintahan kota Lhokseumawe sudah di anggap baik hanya perlu di pertahankan dan di tingkatkan lagi.
4. Teknologi informasi yang disediakan pemerintahan kota Lhokseumawe sudah memadai hanya perlu di tingkatkan dan dipertahankan.
5. Komunikasi yang ada dalam pemerintahan kota Lhokseumawe perlu ditingkatkan lagi, dengan cara mensosialisasikan tentang standar akuntansi basis akrual. Sehingga kedepannya bisa mendukung penerapan standar akuntansi basis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.
6. Kepada peneliti selanjutnya perlu menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dikuesioner sehingga penelitian lebih mendalam.
7. Kepada peneliti selanjutnya agar menambah kategori responden seperti seluruh karyawan yang ada di bagian keuangan.

## **REFERENSI**

- Adventana, G.A, 2010, Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah DIY Dalam Implementasi SAP Berbasis Akruwal Menurut PP no 71 Tahun 2010, Tesis Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Aldiani, Sulani, 2009, Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Simposium Nasional XII, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Andrililina, T dan Prayitno, D.J. 2015. Pengertian Kompetensi. Diakses melalui: <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/0-Kompetensi-dan-Manajemen-Sumber-Daya-Manusia-pada-25-januari-2020>
- Erawati, T., & Kurniawan, D. 2018. Penerapan sistem akuntansi berbasis akruwal: kajian dari aspek keperilakuan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 313-332.
- Faradillah, 2013, Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010), E- Journal Universitas Palangkaraya, Palangkaraya.
- Ferdian, F. 2018. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Basis Akruwal Pada Pemerintahan Di Kota Padang (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Lanjut dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Kristiawati, E. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas*, 8(3), 171-190.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. *E-Jurnal Akuntansi*, 14-32.
- Putri, D. U. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi terhadap Penerapan Standar akuntansi pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB)*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Riyanto, dan Agus, P. 2015. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, Stephen, P. 2006, Perilaku Organisasi Edisi kesepuluh, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Safitri, D. 2017. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5(2), 174-189.
- Silfi, A., Azlina, N., & Iznillah, M. L. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).
- Susanti, T. F., & Agusti, R. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sap Berbasis Akruwal Di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 11-24.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- [Suharso. 2016. Basis akuntansi pemerintah di Indonesia. Diakses melalui: https://www.klikharso.com/2016/03/basis-akuntansi-pemerintahan-di.html pada 25 Januari 2020](https://www.klikharso.com/2016/03/basis-akuntansi-pemerintahan-di.html)